

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP RASIO KAPASITAS FISKAL DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022**

(Skripsi)

Oleh

**ANNISA FITRIA
NPM 1911021043**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER, DAN
JUMLAH PENDUDUK TERHADAP RASIO KAPASITAS FISKAL DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022**

Oleh
ANNISA FITRIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRACT

THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE, TRANSFER FUNDS AND POPULATION ON FISCAL CAPACITY RATIO IN LAMPUNG PROVINCE FROM 2017-2022

By

ANNISA FITRIA

This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue Growth, Transfer Fund, and Population Growth on Fiscal Capacity Ratio in Lampung Province in 2017-2022. This study uses secondary data obtained from the Ministry of Finance. The results of panel data regression analysis with the selected model, namely the Fixed Effect Model (FEM), show that the independent variable, namely the Growth of Regional Original Revenue, has a significant effect on the Fiscal Capacity Ratio and the Transfer Fund has not had a significant effect on the Fiscal Capacity Ratio. population has not had a significant effect on the Fiscal Capacity Ratio It is hoped that this research can help the government to further optimize the potential of PAD to create regional independence..

Keywords: *Fiscal Capacity Ratio, Local Government Revenue, Transfer Funds, Population, Panel Data*

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA TRANSFER, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP RASIO KAPASITAS FISKAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017-2022

OLEH

ANNISA FITRIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Jumlah Penduduk terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kementerian keuangan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan menggunakan *E-views 9*. Hasil analisis regresi data panel dengan model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Kapasitas Fiskal. Dana Transfer belum berpengaruh yang signifikan terhadap Rasio Kapasitas Fiskal. Jumlah Penduduk belum berpengaruh signifikan terhadap Rasio Kapasitas Fiskal. Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk lebih mengoptimalkan potensi PAD untuk menciptakan kemandirian daerah.

Kata Kunci : Rasio Kapasitas Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Jumlah Penduduk, Data Panel

Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA TRANSFER, DAN JUMLAH
PENDUDUK TERHADAP RASIO KAPASITAS
FISKAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN
2017-2022**

Nama Mahasiswa : **Annisa Fitriia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1911021043**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih, Y.T., S.E., M.M.

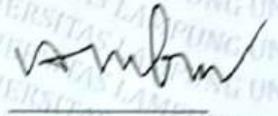
NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

Prof.Dr.Ambya, S.E.,M.Si.



Penguji I

Prof.Dr. Marselina, S.E., M.P.M



Penguji II

Dr. Arivina Ratih, Y.T, S.E., M.M.

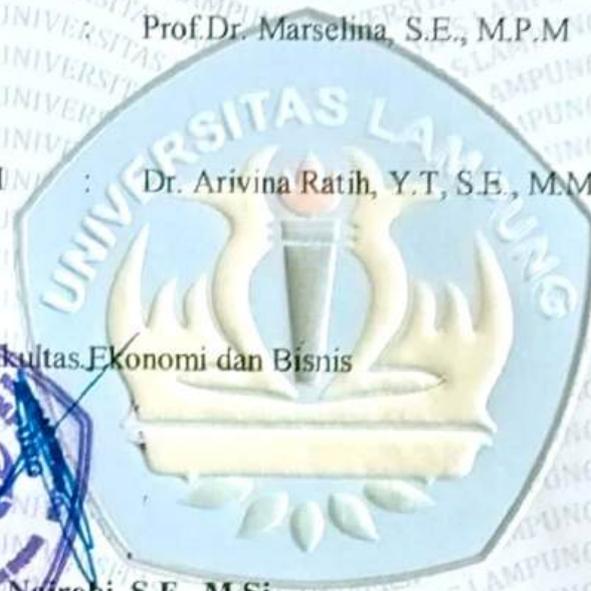


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Juli 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fitria

NPM : 1911021043

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Jumlah Penduduk Terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017-2022 adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 September 2024

Penulis



Annisa Fitria

1911021043

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Annisa Fitria yang lahir pada tanggal 4 Desember 2001 di Sukamarga, Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M.Nur Adam dan Ibu Tita Mundrika.

Penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Sukamarga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2013. Pada jenjang selanjutnya penulis menempuh pendidikannya di SMP Negeri 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama kuliah penulis ikut serta dalam berorganisasi di tingkat fakultas. Penulis ikut serta sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis menjadi staff bidang 1 Pembinaan dan Pengembangan Profesi di *Economic Business Entrepreneur Club (EBEC) FEB Unila*. Pada tahun 2022 penulis telah menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lebung Nala Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar “

(Q.S Ar-Rum ayat 60)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi sering
ketakutanlah yang membuat jadi sulit”

(Joko Widodo)

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, *prove them wrong*”

“*Gonna fight and don't stop, until you are proud*”

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW, serta berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini

Penulis persembahkan karya terbaik ini kepada diriku yang begitu kuat bertahan hingga sampai dititik ini.

Kedua orang tuaku yang tersayang, terhormat, tercinta sebagai panutan hidupku,

Bapak M.Nur Adam Ibu Tita Mundrika

Terima kasih telah merawat anak bungsumu dengan penuh rasa kasih sayang, membimbing diriku untuk menjadi anak yang tangguh dan kuat. Selalu meluangkan waktu dalam momen-momen terpenting yang ada di hidupku, selalu memotivasi dan memberikan dukungan moril maupun materi, selalu mendoakan kesuksesan dalam setiap langkahku. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan semua hal yang telah engkau lakukan untuk diriku. Kalian penyemangat dalam mewujudkan cita-cita ini.

Kedua kakakku tersayang Septria Nurika dan Meilia Nursinta

Terimakasih untuk kasih sayang dan selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis untuk menjadi adik kebanggaan kalian

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan terimakasih telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga dan sahabat-sahabat seperjuangan yang senantiasa membantu dan memberi semangat, terimakasih untuk semua hari-hari penuh warna.

Serta

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Jumlah Penduduk Terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi Lampung Pada Tahun 2017-2022"

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan serta bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, atas kesempatan ini serta kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho serta keberkahan, penulis sudah diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung juga selaku dosen Pembimbing Akademik.
3. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
4. Bapak Prof.Dr.Ambya,S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dengan penuh kesabaran serta memberikan kritik dan saran, motivasi yang terbaik, dukungan, ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M. selaku dosen pembahas pada seminar proposal dan seminar hasil juga sebagai dosen penguji yang telah memberikan

motivasi, dukungan, kritik dan nasihat yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Prof.Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku dosen pembahas pada seminar proposal, juga sebagai dosen penguji terimakasih atas bimbingan, ilmu yang bermanfaat, saran, dan motivasi untuk penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu keperluan administrasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tuaku yang terhormat, tercinta, dan tersayang Bapak M.Nur Adam, dan Ibu Tita Mundrika. Terima kasih atas segala usaha dan pengorbanan yang telah diberikan untuk mendukung penulis, telah mendoakan dengan sepenuh hati dan kasih sayang merawat, membesarkan, melindungi, dan mendidik penulis dengan baik. Semoga ayah dan ibu selalu sehat.
10. Untuk kedua kakakku tersayang Septria Nurika dan Meilia Nursinta dan juga kedua abang ipar Junari dan Win Santoni. Terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam menjalankan perkuliahan ini.
11. Untuk keponakanku tersayang dan terlucu, Fadlan Choirul Anam, Aisyah Adiba Wening, Asyahnaz Shazia, Adika Rayyan. Terimakasih atas senyuman dan tawa kalian menjadi penyemangat penulis dalam menjalankan perkuliahan.
12. Untuk partnerku dari SMA sampai saat ini Yopan Falentino. Terimakasih telah memberikan support, menjadi teman cerita. Semoga kamu sukses aamiin.
13. Sahabat seperjuanganku selama masa perkuliahan hingga saat ini(PERI GUD PERI WELL) Aliffia Novrima Giana, Ikramina Salsabila Nuramalina ,Fitri Seftiyati, dan Rr. Halimatu Hanna. Terima kasih selalu ada untuk menemani. Semoga pertemanan selalu kita tetap terjalin dengan baik.

14. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan 2019 (Keluarga Cemara) dan teman-teman se konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih semoga pertemanan dan silaturahmi kita tetap terjalin baik sekarang dan kedepannya serta semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
15. Teman-teman (Marga Alam) Nova, Anggi, Desy, Diah Intan, Elsa, Melling ,Rilly Yunita, Cici, Alvina, Rio, Hans, Muhammad Farrel, Manda Bagaskara, Dion, Arif, dll. Terima kasih karena selalu siap membantu khususnya pada awal perkuliahan hingga saat ini.
16. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
17. Terimakasih Almamater tercinta, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 12 September 2024

Annisa Fitria

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teoritis	9
1. Desentralisasi fiskal	9
2. Otonomi daerah	10
3. Pendapatan asli daerah	11
4. Pendapatan transfer	13
5. Jumlah penduduk	15
6. Kemandirian daerah	16
7. Teori Kapasitas Fiskal	18
B. Tinjauan Empiris	21
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Hipotesis	26
III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian	27
B. Definisi Variabel	28
1. Pendapatan Asli Daerah	28
2. Dana Transfer	28
3. jumlah penduduk	28
4. Rasio Kapasitas Fiskal	29
C. Metode Analisis	29
D. Prosedur Analisis Data	30
1. Analisis Statistik Deskriptif	30
2. Metode Regresi Data Panel	30
a. Metode <i>Common Effect Model</i> (CEM)	30

	b. Metode <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	30
	c. Metode <i>Random Effect Model</i> (REM)	31
3.	Pemilihan Metode Regresi Data Panel	32
	a. Uji Chow	32
	b. Uji Hausman	32
	c. Uji Lagrange Multiplier	33
4.	Pengujian Asumsi Klasik	33
	a. Uji Multikolinearitas	33
	b. Uji Heteroskedastisitas	34
5.	Pengujian Hipotesis	34
	a. Uji t	34
	b. Uji F	35
6.	Koefisien Determinasi (R^2)	36
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A.	Analisis Statistik Deskriptif	37
	1. Rasio Kapasitas Fiskal	37
	2. Pendapatan Asli Daerah	38
	3. Dana Transfer	38
	4. Jumlah Penduduk	39
B.	Uji Kesesuaian Model	39
	1. Uji Chow	39
	2. Uji Hausman	40
	3. Uji Lagrange Multiplier	41
C.	Pengujian Asumsi Klasik	42
	1. Uji Multikolinearitas	42
	2. Uji Heterokedastisitas	43
D.	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Model Random Effect	43
E.	Pengujian Hipotesis	44
	1. Uji t	44
	2. Uji F-Statistik	46
F.	Koefisien determinasi R^2	47
G.	Individual Effect	47
H.	Pembahasan Hasil Penelitian	49
	1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022	50
	2. Pengaruh Dana Transfer terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022	55
	3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022	59

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer jumlah penduduk terhadap Rasio Kapasitas Fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.....	60
V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1. Deskripsi Variabel Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif	37
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	40
Tabel 4.3. Hasil Uji Hausman	40
Tabel 4.4. Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	41
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas	42
Tabel 4.6. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	43
Tabel 4.7. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Model <i>Fixed Effect</i>	44
Tabel 4.8. Hasil Uji t-statistik Variabel PAD.....	45
Tabel 4.9. Hasil Uji t-statistik Variabel Dana Transfer	45
Tabel 4.10. Hasil Uji t-statistik Variabel jumlah penduduk.....	45
Tabel 4.11. Hasil Uji F-Statistik.....	46
Tabel 4.12. Nilai Individual effect.....	47

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi salah satu rencana pembangunan yang kini dilakukan Indonesia. Pergeseran sistem desentralisasi ke dekonsentrasi disebut proses otonomi daerah (Suryana, 2000). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan meratanya pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan daerah untuk menjamin adanya pemerataan pembangunan secara optimal merupakan tujuan dan sasaran pembangunan otonomi daerah, selain untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat. Agar hal ini dapat tercapai, maka harus mempertimbangkan potensi dan keunikan masing-masing daerah (Deddy, 2002).

Indonesia memberikan banyak kebebasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengambil keputusan. Pemerintah pusat berupaya mempercepat pembangunan regional dan pertumbuhan ekonomi melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan layanan publik agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Selain mengupayakan otonomi daerah dalam pengelolaan wilayah, pemerintah juga harus mampu mengelola dan menggali potensi masing-masing wilayah dengan baik untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan tersedianya otonomi daerah, suatu daerah mampu meningkatkan kinerja keuangannya sehingga mampu mencapai kemandirian dan menggali potensi daerahnya (Khusaini, 2006). Agar suatu wilayah dianggap mandiri secara finansial dan mampu mengembangkan daerahnya sendiri, maka

wilayah tersebut harus mampu mengelola anggarannya sendiri. Salah satu ciri yang paling jelas bahwa suatu daerah dapat berfungsi secara mandiri adalah kemampuannya dalam mengelola keuangannya sendiri. Hal ini menuntut daerah otonom mempunyai kompetensi dalam mengelola keuangannya sendiri, mempunyai kekuasaan dalam memanfaatkan sumber daya daerah, dan mempunyai pendapatan yang cukup untuk mendanai keperluan belanja daerah. Dalam rangka mengurangi ketergantungan pada pemerintah negara, kebijakan dana transfer mengharuskan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah adalah komponen paling utama dari pendanaan terbesar.

Dengan demikian, kemampuan fiskal suatu daerah menjadi tolak ukur kemandiriannya. Kapasitas Fiskal menunjukkan keuangan suatu daerah dan memungkinkan pemerintah daerah memahami kondisi sektor keuangan masyarakat setempat. Sesuai 193/PMK.07/2022, gambaran kapasitas fiskal dicerminkan melalui pendapatan APBD yang dikurangi belanja daerah. Yang bukan terdiri dari dana alokasi khusus, dana pinjaman lama, dana darurat, atau pendapatan yang penggunaannya terbatas pada pembiayaan belanja tertentu yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas pemerintahan. Salah satu ukuran otonomi daerah adalah kemandirian daerah yang dikelompokkan dalam rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD), yang mengklasifikasikan daerahnya berdasarkan kemampuan fiskalnya yang sangat tinggi, sedang, hingga rendah.

Tabel 1.1 Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022

Kabupaten/kota	RKF	Kategori	Kabupaten/kota	RKF	Kategori
Prov. Lampung	1.58	Rendah	Tulang Bawang	1.57	Sedang
Lampung Barat	1.26	Rendah	Pesawaran	1.50	Sedang
Tanggamus	1.64	Sedang	Pringsewu	1.17	Sangat rendah
Lampung Selatan	1.34	Rendah	Mesuji	2.05	Tinggi
Lampung Timur	1.42	Rendah	T.Bawang Barat	1.35	Rendah
Lampung Tengah	1.39	Rendah	Pesisir Barat	2.15	Tinggi
Lampung Utara	0.87	Sangat rendah	Bandar Lampung	1.34	Rendah
Way Kanan	1.35	Rendah	Metro	1.12	Sangat rendah

Sumber : Kemenkeu Tahun 2022

Pada tahun 2022, dari 13 kabupaten dan 2 kota yang termasuk dalam Provinsi Lampung, hanya Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki rasio kapasitas fiskal dalam kategori tinggi, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Bahkan ada juga yang tergolong sangat rendah yaitu kabupaten Pringsewu, Lampung Utara, dan kota Metro. Sedangkan pada lingkup Provinsi Lampung pada tahun 2022 yang masih tergolong rendah yaitu dengan rasio sebesar 1,580, bahkan mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan kategori sedang. Rasio kapasitas fiskal yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di provinsi Lampung anggaran pendapatannya lebih rendah dibanding belanja daerah.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lainnya yang sah adalah sumber Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber keuangan negara serta telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dalam UU No. 33 Tahun 2004. Agar PAD dapat mencerminkan kemandirian, maka perlu adanya pendanaan dari daerah itu sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai daerahnya ditunjukkan oleh kuatnya struktur PAD yang dimilikinya. Seiring dengan semakin

banyaknya wewenang dan sumber daya yang diberikan pada pemerintah regional, termasuk sumber daya manusia, pembiayaan, dan dokumen ke daerah, maka kebutuhan akan PAD pun semakin meningkat (Wahyudi, 2010). Untuk mendukung otonomi, pemerintah daerah perlu lebih inventif dan kreatif dalam meningkatkan PAD dan memberikan fleksibilitas belanja APBD, meskipun jumlah dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah negara cukup memadai.

Sebanyak Rp 4,73 triliun realisasi APBD Provinsi Lampung pada triwulan III tahun 2022, menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Jumlah tersebut mencapai 72,18% dari target pendapatan tahun 2022 yang sebesar Rp6,56 triliun. Hal ini nampaknya membaik dibandingkan tahun 2021, meski nominal pendapatan APBD 2021 lebih tinggi yaitu Rp5,09 triliun, namun target pendapatan yang terserap hanya 67,54%. Meskipun Pendapatan Transfer turun sebesar -0,32% year on year, namun pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan realisasi penerimaan pos dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,80% year on year. Sumber-sumber PAD itu sendiri meningkatkan penerimaan PAD masing-masing sebesar 82,76% dan 58,54% bersumber dari Pajak Daerah & PAD lainnya yang sah. Realisasi komponen Pajak Daerah tahun 2022 meningkat sebesar 15,66% (yoy) dan komponen PAD Lain-lain yang Sah meningkat sebesar 12,02% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah juga mengalami peningkatan pada pos Pendapatan Transfer yaitu sebesar 351,51% (yoy). Terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada realisasi anggaran belanja tahun 2022. Jumlah tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp4,26 triliun atau 56,40 persen dari sasaran belanja APBD tahun 2021.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki PAD sebesar 8,87%, berada di bawah rata-rata daerah sebesar 25%, TKDD sebesar 80%, dan Pendapatan

Lain-lain sebesar 10,43%. Oleh karena itu, PAD termasuk dalam kategori kapasitas keuangan daerah Lampung “sangat rendah” (8,87 persen), yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk tanggung jawab pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masih sangat rendah. Selain potensi PAD, dalam menyeimbangkan kapasitas fiskal juga didorong oleh dana transfer pemerintah pusat. Dana tersebut akan ditransfer oleh pusat kepada daerah untuk memenuhi ketimpangan antar daerah (Yuliana; Adi Wijaya; Mauliadi, 2021). Sumber pendapatan disuatu daerah sangat penting diperhatikan karena sumber inilah yang menjadi penopang utama pembangunan daerah serta sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat setempat..

Peningkatan kualitas desentralisasi fiskal melalui pemulihan ekonomi dan peningkatan kinerja daerah menjadi tujuan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022. Strategi peningkatan kualitas belanja yang bertujuan untuk mencapai pemerataan daerah didanai oleh TKDD. Total alokasi dana TKDD Provinsi Lampung pada tahun 2022 senilai Rp21,18 triliun yang termasuk pada Dana Bagi hasil realisasi penuh Rp 711,23 miliar dan dana alokasi umum Rp12.021,11 miliar. (BPS Provinsi Lampung)

Peneliti Herdiyana, (2019) menemukan bahwa PAD dan DBH merupakan unsur yang paling berpengaruh pada Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) di provinsi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil merupakan unsur yang paling berpengaruh bagi kabupaten/kota. Jika rasio PAD/DBH terhadap pendapatan tinggi di daerah tertentu, maka memiliki Indeks KFD yang baik begitupun sebaliknya jika PAD rendah maka memiliki Indeks KFD rendah. Di daerah yang pemerintah provinsinya mempunyai Indeks KFD rendah, mayoritas kabupaten dan kota mempunyai Indeks KFD rendah . Sebaliknya, di daerah yang pemerintah provinsinya

mempunyai Indeks KFD yang tinggi, mayoritas kabupaten serta kota juga mempunyai indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang tinggi.

Penduduk adalah elemen krusial dalam perencanaan pembangunan daerah karena mereka merupakan sumber daya manusia yang esensial untuk memastikan pelaksanaan rencana berjalan dengan efektif. Penduduk merujuk pada individu yang tinggal secara menetap dalam suatu wilayah. Menurut buku Todaro (2000) menyebutkan pertumbuhan penduduk bukan suatu masalah. Pada tingkat moderat, jumlah penduduk memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan jumlah penduduk membawa lebih banyak ide, individu berbakat, dan tenaga ahli, yang pada akhirnya mendorong perkembangan teknologi. Penduduk menjadi suatu keuntungan dalam jangka panjang karena pembangunan ekonomi didorong Pertumbuhan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Hal ini mendorong "ekonomi skala" dalam produksi, yang pada gilirannya menurunkan biaya produksi. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, penerimaan pendapatan daerah juga dapat terpengaruh, yang selanjutnya mendorong peningkatan produksi, memperluas usaha yang ada, dan mendorong pendirian usaha baru di sektor produksi.

Oleh karena itu, untuk mencapai otonomi daerah yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan sumber-sumber lainnya, suatu daerah harus mencari cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasio kapasitas fiskalnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keseimbangan anggaran, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap daerah mempunyai sumber daya yang diperlukan, termasuk kemampuan mempertahankan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber lain, sehingga setiap daerah dapat mandiri secara finansial.

Peningkatan rasio kapasitas fiskal daerah sangatlah penting oleh karena itu perlu melakukan suatu upaya untuk melihat sejauh mana potensi ekonomi dapat dimanfaatkan dan dijadikan pendapatan daerah. Karena terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan desentralisasi, masing-masing daerah tidak dapat berfungsi secara optimal dan masih bergantung pada pendanaan pemerintah pusat. Dengan demikian penulis akan mengkaji hubungan rasio kapasitas fiskal daerah Provinsi Lampung dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Jumlah Penduduk tahun 2017 hingga tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, maka dirumuskan masalah berdasarkan penjelasan sebelumnya sebagai berikut ini:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, tetapi rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung masih rendah dan juga masih ada kabupaten yang tergolong sangat rendah. Oleh karena itu bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap rasio kapasitas fiskal Provinsi Lampung.
2. Dana Transfer mengalami peningkatan, tetapi rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung masih rendah dan juga masih ada kabupaten yang tergolong sangat rendah. Oleh karena itu bagaimana pengaruh Dana Transfer terhadap rasio kapasitas fiskal Provinsi Lampung.
3. Jumlah Penduduk mengalami peningkatan, tetapi rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung masih rendah dan juga masih ada kabupaten yang tergolong sangat rendah. Oleh karena itu bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap rasio kapasitas fiskal Provinsi Lampung
4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Transfer dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Rasio Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka terdapat tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2022.
2. Menganalisis pengaruh Dana Transfer terhadap rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2022.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap rasio kapasitas fiskal Di Provinsi Lampung pada tahun 2017-2022.
4. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Transfer dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama terhadap Rasio Kapasitas Fiskal Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan pada penelitian ini dapat dijadikan ilmu mengenai kapasitas fiskal daerah.
2. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penulis berikutnya.
3. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan pustaka bagi penelitian-penelitian lainnya.
4. Temuan penelitian ini juga akan mendorong para pengambil kebijakan di Provinsi Lampung untuk memikirkan cara untuk meningkatkan rasio kapasitas fiskal daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah metode yang digunakan oleh negara untuk mengelola sektor publik, yang biasanya mencerminkan perbedaan sejarah, kondisi geografis, keseimbangan politik, tujuan kebijakan, dan karakteristik unik dari masing-masing negara (Bird dan Vallaincort, 2000: 15). Berdasarkan Pasal 2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, prinsip-prinsip utama desentralisasi fiskal meliputi:

- a. Desentralisasi fiskal harus terintegrasi dalam sistem Keuangan Negara sebagai bagian dari pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Penyaluran keuangan ke daerah harus sesuai dengan tugas yang diserahkan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- c. Perimbangan Keuangan harus menciptakan sistem menyeluruh untuk pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi disparitas layanan, dan efisiensi sumber daya nasional. Kebijakan ini menekankan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam transfer ke daerah serta mendukung kesinambungan fiskal makro. Pemerintah daerah diberi wewenang memungut pajak dan retribusi, dengan transfer meliputi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus.

2. Otonomi Daerah

Kata Latin "autos" (berarti "diri" atau "pemerintahan") dan "nomos" (yang berarti "pemerintahan sendiri"). Dengan demikian, pengaturan mandiri dan pemerintahan mandiri adalah definisi otonomi yang merupakan tanggung jawab, kewewenangan, dan hak daerah otonomi untuk menyelenggarakan serta mengawasi kegiatan pemerintah dan kepentingan masyarakat berdasarkan pada ketentuan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hakikat otonomi yaitu kemampuan menjalankan urusannya sendiri dalam suatu wilayah yang mandiri, dengan memperhatikan kebutuhan daerah berdasarkan sumber daya dan potensinya.

Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 melakukan beberapa perubahan besar dengan nuansa sentralistik. Tujuan dari revisi ini adalah untuk membangkitkan kembali semangat kebebasan didaerah, seperti yang tertuang pada undang-undang awal. Dalam penulisan ulang undang-undang no. 32 dan 33 pada tahun 2004 paradigma yang dianut adalah pembangunan nasional harus dilaksanakan dari sudut pandang masyarakat daerah, bukan atas pemerintah pusat.

Pada tahun 1974, UU No. 5 diundangkan dengan tujuan "membangun otonomi daerah yang benar-benar nyata dan bertanggung jawab". Ini merupakan pengenalan pertama mengenai otonomi daerah di Indonesia. Kombinasi antara pemerintahan pusat yang kuat dan otonomi sangatlah berarti bagi negara yang mempunyai wilayah sangat luas untuk mencapai kemajuan. Beberapa langkah, terutama UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengubah rezim desentralisasi serta otonomi semu yang menyebabkan sentralisasi menjadi desentralisasi jenis baru. Saat

ini pemerintahan daerah diatur oleh UU no.32 Tahun 2004 ini adalah versi terbaru dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diterima suatu daerah bersumber dari potensi yang ada di daerahnya sendiri dan dilakukan menurut norma atau peraturan daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena ini menunjukkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan suatu daerah untuk hal-hal seperti pembangunan daerah dan program pemerintah, maka sektor pendapatan daerah sangatlah penting. Pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber dalam suatu daerah disebut dengan Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan inisiatif pada pembangunan daerah berkorelasi langsung dengan tingkat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap keuangan daerah (Carunia, 2017).

Pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber-sumber sah lainnya, merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada banyak pilihan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah setara atau melebihi potensi pendapatannya, namun secara umum, intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dua strategi terbaik untuk memaksimalkan PAD. Yang pertama digunakan untuk hukuman, yang berarti memperkirakan potensi dengan seakurat mungkin sehingga tujuan pendapatan mendekati potensi tersebut, sedangkan yang kedua digunakan untuk mencari sumber pajak lain atau untuk menarik wajib pajak (Carunia, 2017). Pendapatan asli daerah sebagaimana tercantum pada “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Republik Indonesia meliputi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah berasal dari wilayah bersangkutan. Kemampuan pemerintah daerah untuk membawa tanggung jawab yang besar berbanding lurus dengan proporsi pendapatan asli daerah. Meski demikian,

ketergantungan terhadap pusat makin meningkat seiring dengan menurunnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerahnya”.

Komponen PAD

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Sumber Pendapatan Asli Daerah yang mana dalam Pasal 6 meliputi “pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan badan usaha milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dapat dibedakan secara tersendiri”. Hal ini membantu menjaga keseimbangan keuangan antar wilayah pusat dan daerah. Pendapatan daerah yang sah berasal dari berbagai sumber, antara lain sumbangan pemerintah, yang meliputi sumbangan yang sah menurut undang-undang, serta sumber pendapatan lain yang sah, seperti:

a. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang mengubah Undang-Undang No. 8 Tahun 1997, “pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah”. Pajak daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan negara, memainkan peran krusial dalam mendanai berbagai pengeluaran, termasuk pembangunan (Mardiasmo, 2011).

b. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pajak di tingkat daerah yang dibayarkan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk menutupi biaya berbagai layanan dan izin yang ditawarkan oleh pemerintah daerah (Sutedi, 2008). Tujuan retribusi sebagaimana tercantum pada “Undang-Undang No.28 Tahun 2009 untuk mendanai pemberian jasa tertentu dan pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang atau badan usaha”. Oleh karena itu, pemerintah daerah

memberikan izin tertentu atau memungut retribusi daerah dari orang atau perusahaan sebagai imbalan atas jasanya.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan

Porsi pendapatan BUMD yang diperoleh pemerintah regional juga menjadi sumber pendapatan PAD cukup besar, menduduki peringkat ketiga setelah retribusi dan pajak daerah. Menciptakan lapangan kerja atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjadi tujuan utama dibangunnya BUMD. Tak hanya itu, BUMD berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan bantuan dalam pengabdian kepada masyarakat.

Keuntungan badan usaha milik daerah, Keuntungan lembaga keuangan bank, Keuntungan lembaga keuangan bukan bank, dan Keuntungan laporan modal dan investasi merupakan contoh jenis penghasilan yang diklasifikasikan berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33. Adapun jenis usaha ini mendapat bagian yang adil dari keuntungan pengelolaan kekayaan daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Ayat 3 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Selain keuntungan perusahaan daerah, PAD lain-lain yang sah antara lain keuntungan hasil bank dan lembaga keuangan bukan bank serta keuntungan laporan modal dan investasi.

4. Pendapatan Transfer

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 jika bicara mengenai desentralisasi dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan transfer mengacu pada APBN atau uang APBD provinsi yang dikirim ke daerah. Daerah-daerah tersebut kemudian diberi kewenangan untuk

membelanjakan uang tersebut sesuai keinginan mereka. Komponen pendapatan transfer adalah:

A. Pendapatan transfer pemerintah pusat,

Artinya, dana APBN yang dikirim ke daerah dimaksudkan agar digunakan berdasarkan dengan kewenangan untuk menunjang kebutuhan daerah dalam melakukan proses desentrallisasi. Pendapatan ini termasuk:

a. Dana perimbangan, Secara spesifik, ada tiga jenis dana yang disalurkan dari pendapatan APBN yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Tujuannya adalah mendukung kebutuhan daerah dalam melakukan desentralisasi dan meratanya kemampuan keuangan tiap daerah.

b. Dana insentif daerah, misalnya, dana APBN disalurkan ke berbagai daerah berdasarkan kriteria tertentu sebagai penghargaan atas kinerja atau kemajuan yang luar biasa.

c. Dana otonomi khusus, Artinya, dana APBN yang ditransfer pada daerah otonom sesuai aturan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

d. Dana keistimewaan, khususnya dana APBN yang disalurkan ke daerah-daerah yang sudah ditentukan berdasarkan amanat peraturan undang-undang.

e. Dana desa, Secara khusus, dana APBN yang diperuntukkan bagi desa disalurkan melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan agar mendukung tugas-tugas administrasi, proyek pembangunan, inisiatif pemberdayaan masyarakat, dan proyek pembangunan.

B. Pendapatan transfer antar-daerah,

Secara khusus, dana APBD provinsi yang masuk ke daerah dimaksudkan untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah dalam menunjang kebutuhan daerah untuk melakukan proses desentrallisasi. Yang terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil, khususnya uang yang berasal dari pendapatan suatu daerah dan dikirim ke daerah lain menurut proporsi yang telah ditentukan dan dituangkan dalam undang-undang.
- b. Bantuan keuangan, khususnya, dana yang dipinjam dari daerah lain demi kepentingan regional, peningkatan kemampuan keuangan yang lebih setara, atau tujuan lain yang telah ditetapkan.

5. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, penduduk adalah individu yang tinggal di Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau kurang dari enam bulan namun berniat menetap. Definisi ini mencakup semua orang yang tinggal di wilayah geografis Indonesia baik untuk jangka waktu panjang maupun pendek dengan tujuan menetap. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seperti yang dikutip dalam Thea (2022), menyebutkan bahwa penduduk meliputi Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Dengan demikian, penduduk Indonesia terdiri dari WNI dan WNA, menambah keragaman budaya dan karakteristik di negara ini.

Kartomo Wirosuhardjo (2022), seorang ahli, menyatakan bahwa penduduk adalah sejumlah individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan pengertian ini, seseorang yang tinggal di suatu daerah, baik WNI maupun WNA, dapat dianggap sebagai penduduk. Mereka yang tinggal di suatu wilayah akan terikat oleh norma sosial, budaya, politik, serta hak dan kewajiban yang berlaku di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk di suatu daerah memainkan beberapa peran penting. Selain sebagai produsen, penduduk juga berperan sebagai konsumen. Populasi yang besar akan meningkatkan penawaran dan permintaan dalam aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya menguntungkan berbagai pihak. Peningkatan

aktivitas ekonomi di suatu wilayah juga akan berdampak pada penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung kemandirian keuangan daerah.

6. Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan sejauh mana Pemerintah Daerah dapat membiayai pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat melalui pendapatan dari pajak dan retribusi. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, meskipun pengukuran kemampuan ini dapat bervariasi. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Abdul Halim, 2007: 168-169) mengidentifikasi empat pola hubungan dalam konteks Otonomi Daerah sesuai dengan “UU Nomor 33 dan 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan”:

- a. Pola Hubungan Interaktif, Pemerintah Pusat memiliki peran dominan, sementara Pemerintah Daerah masih belum sepenuhnya mandiri dalam menjalankan otonomi..
- b. Pola Hubungan Konsultatif, Pemerintah Pusat mengurangi campur tangan, karena daerah dianggap lebih mampu menjalankan otonomi..
- c. Pola Hubungan Partisipatif, Peranan Pemerintah Pusat menurun seiring meningkatnya kemandirian daerah dalam mengelola urusan otonom.
- d. Pola Hubungan Delegatif, Pemerintah Pusat tidak terlibat, karena daerah sepenuhnya mandiri dalam menjalankan Otonomi Daerah.

Perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah muncul karena variasi dalam potensi sumber daya alam dan manusia.

Konsep Kemandirian Fisikal

Pembangunan daerah adalah bagian penting dari pembangunan nasional, bertujuan mencapai efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan dengan fokus lokal pada aspek sosial ekonomi. Pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi menjadikan pemerintah daerah sebagai mitra pemerintah pusat dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, daerah perlu memiliki dukungan keuangan yang memadai agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunannya secara mandiri. Kartasasmita, seperti dikutip dalam Triastuti (2005), menekankan bahwa kemandirian adalah inti kemerdekaan, yaitu hak untuk menentukan nasib dan mengelola kepentingan sendiri. Otonomi daerah bertujuan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mandiri dalam pengelolaan keuangan melalui desentralisasi fiskal, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi lokal.

Halim (2007) mengidentifikasi dua ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi:

- a. Kemampuan Keuangan Daerah, Daerah harus dapat menggali, mengelola, dan menggunakan sumber pendapatannya sendiri untuk mendanai pemerintahannya.
- b. Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah Pusat, Harus diminimalkan dengan mengandalkan PAD sebagai sumber utama pendapatan, didorong kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Kedua aspek ini memengaruhi pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semakin baik kinerja keuangan daerah, semakin besar kemampuannya untuk membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemandirian daerah dalam mendanai pembangunan dan pelaksanaan otonomi.

Semakin baik kinerja keuangan daerah, semakin besar kemampuannya untuk membiayai pengeluaran tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Kontribusi PAD yang tinggi dan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan sendiri menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang solid mencerminkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan melaksanakan otonomi.

7. Teori Kapasitas Fiskal

Kata "fiskal" dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa arti literal, termasuk pajak, pendapatan publik, dan utang publik, dan akar etimologinya adalah kata Latin "fiscus", yang merupakan nama pribadi pada zaman Romawi dari orang yang memegang keuangan pertama. Sedangkan fiskal dikaitkan dengan masalah pajak atau penerimaan negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tujuan kebijakan ini yaitu memperkuat ketahanan perekonomian agar menyesuaikan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Menurut Ibrahim (2013), kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengendalikan kinerja perekonomian dengan menggunakan alat-alat seperti perpajakan dan belanja untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Menurut Muta'ali (2015), kemampuan keuangan pemerintah daerah agar secara mandiri mendanai operasional, pembangunan, dan pelayanan publik merupakan tolok ukur otonomi fiskal yang dimilikinya.

Kebijakan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Singkatnya KFD; "kemampuan tiap daerah dalam mengelola keuangannya sendiri yang ditunjukkan dengan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya, belanja daerah tertentu, dan belanja pembiayaan daerah tertentu. Sedangkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah merupakan pengkategorian kemampuan dalam mengelola keuangan menurut Rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan menggunakan rasio ini, kita dapat mengklasifikasikan

daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah. Sebaliknya, daerah pertumbuhan yang tidak memiliki APBD dikelompokkan berdasarkan kemampuan fiskal daerah induknya. Daerah dikatakan mempunyai kemampuan fiskal yang kuat apabila indeks kapasitas fiskalnya sama atau lebih dari 2 (dua). Daerah yang tergolong mempunyai kemampuan fiskal kuat mempunyai nilai indeks antara satu dan dua”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencantumkan biaya-biaya pembangunan besarnya dipengaruhi oleh kemampuan fiskal suatu daerah. Pada kegiatan dan tujuan pembangunan tercapai lebih cepat dengan kapasitas fiskal yang sangat kuat. Hal ini mempercepat pembangunan, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Mengembangkan kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efisiensi, keadilan, dan efektivitas sangat penting agar meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan. Sesuai dengan kebijakan fiskal, retribusi dan pajak mempunyai peranan penting dalam pendanaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pertumbuhan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang riil, adaptif, dan akuntabel.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI 193/PMK.07/2022. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) huruf b, terdapat tahapan dalam proses pembuatan peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten dan kota. Tahapan tersebut adalah:

- a. pertama, menghitung Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten dan kota
- b. kedua, menghitung Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten dan kota.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah kabupaten dan kota yang tercantum dalam “Pasal 3 ayat (2) huruf a” adalah :

KFD kabupaten/kota = pendapatan – [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]

Pendapatan yang dimaksud yaitu

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain lain pendapatan yang sah

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan.

Belanja yang dimaksud meliputi :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bagi hasil
- c. Belanja Bunga
- d. Alokasi dana desa

Rumus ini digunakan untuk menghitung rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b.

$$\text{RKFD kabupaten/kota} = \frac{\text{KFD kabupaten/kota}_i}{\text{Belanja pegawai kab/kota}}$$

Keterangan:

- RKFD kabupaten/kota-i = Rasio kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota
- KFD kabupaten/kota-i = Kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota
- Belanja Pegawai = Belanja Pegawai kabupaten/kota

Berdasarkan PMK Republik Indonesia No.193/PMK.07/2022 menyebutkan berdasarkan perhitungan RKF, daerah dikelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Daerah yang RKF nya lebih dari atau sama dengan 2,171 adalah daerah dalam kategori Rasio Kapasitas Fiskal sangat tinggi

2. Daerah yang RKF nya antara lebih dari atau sama dengan 1.838 sampai kurang dari 2,171 adalah daerah dalam kategori Rasio Kapasitas Fiskal tinggi
3. Daerah yang RKF nya antara lebih dari 1.504 sampai kurang 1.838 adalah daerah dalam kategori Rasio Kapasitas Fiskal Sedang;
4. Daerah yang RKF nya kurang dari atau sama dengan 1.171 sampai kurang dari 1.504 adalah daerah dalam kategori Rasio Kapasitas Fiskal rendah
5. Daerah yang RKF nya kurang dari atau sama dengan 1.171 ($IKF \leq 1.171$) adalah daerah dalam kategori Rasio Kapasitas Fiskal sangat rendah.

B. Tinjauan Empiris

Penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka yang relevan dan berkaitan dengan subjek sebelum memulai penelitian. Datanya dituangkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode	Variabel	Kesimpulan
1	Widi Dian Istiningsih, Andy Dwi Bayu Bawono (2022)	Analisis Kuantitatif	pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, produk domestik regional bruto, kapasitas fiskal	Hasil penelitian menyimpulkan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, produk domestik regional bruto, berpengaruh terhadap kapasitas fiskal
2.	Evrintia (2020)	Metode regresi linear berganda	PAD,DAU,DAK ,kinerja keuangan pemerintah daerah	Hasil dalam penelitian menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

No	Peneliti	Metode	Variabel	Kesimpulan
				daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Muhammad Fachrozi (2020)	analisis statistik deskriptif	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Keuangan Daerah
4.	Fankiskus Kristop (2019)	Metode kualitatif	pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan bagi hasil pajak, kapasitas fiskal	Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, produk domestik regional bruto, dan bagi hasil pajak berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah Kota Batu
5	Frits Fanggidae (2019)	Analisis kuantitatif	PAD, Kapasitas fiskal	Hasilnya PAD berpengaruh positif dalam meningkatkan

No	Peneliti	Metode	Variabel	Kesimpulan
				kapasitas dan ruang fiskal daerah.
7.	Slamet widodo (2020)	Regresi data panel	Dana perimbangan, indeks kapasitas fiskal	Hasil menunjukkan bahwa Dana perimbangan, berpengaruh positif terhadap indeks kapasitas fiskal
8	R neneng rina (2018)	Regresi data panel	PAD ,dana perimbangan, Kemandirian keuangan daerah	Hasil menunjukkan bahwa PAD, berpengaruh terhadap Kemandirian keuangan daerah sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif
9	Ambar Wilujeng (2014)	Analisis Regres ECM	pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemandirian daerah	Variabel pertumbuhan penduduk memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

C. Kerangka Pemikiran

Untuk mendanai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan yang sangat penting. Karena itu, pemerintah sangat ingin memperbaiki dan menggali setiap

peluang yang ada di setiap daerah. Terdapat korelasi antara pendapatan asli daerah dengan kemajuan ekonomi dan kemandirian daerah.

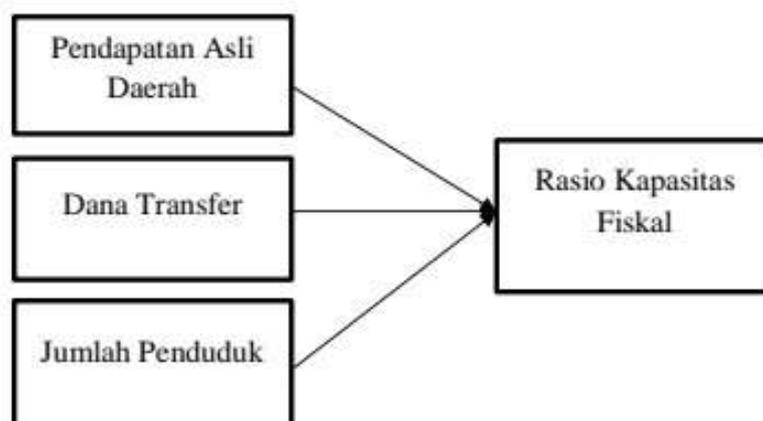
Nurafni dan Muslimin (2019) menemukan bahwa sejauh mana Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bersifat mandiri, pada temuannya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan kemandirian daerah. Hal ini bahwa daerah dapat menjadi mandiri secara finansial dan pemerintah pusat dapat menurunkan alokasi dana perimbangan jika PAD mereka lebih tinggi dibandingkan jumlah bantuan dan pinjaman yang mereka terima dari pemerintah pusat dan provinsi. PAD merupakan mekanisme pendanaan yang mencerminkan keadaan sebenarnya suatu daerah secara akurat karena berasal dari daerah itu sendiri. Hasilnya, semakin banyak daerah yang mencapai swasembada keuangan, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk mendanai pembangunan dan inisiatif pemerintah mereka sendiri.

Dana transfer pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi peningkatan rasio kapasitas fiskal. Ada kemungkinan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan prioritas dengan sejumlah besar pendapatan transfer yang mereka terima dari pemerintah negara. Dana perimbangan APBN disalurkan ke daerah sebagai bagian dari rangka mencapai otonomi daerah. Kesenjangan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah regional, dapat dikurangi dengan alokasi dana perimbangan. Untuk memastikan bahwa tidak ada disparitas sumber daya keuangan antar daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana ke pemerintah daerah melalui program transfer pendapatan pemerintah pusat. Hal ini memungkinkan pemerintah pusat untuk mengakomodasi berbagai kapasitas keuangan di berbagai daerah.

Penduduk di suatu daerah memiliki peran penting sebagai konsumen atau produsen. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan permintaan dan

penawaran, yang menguntungkan banyak pihak. Hal ini berdampak pada pertumbuhan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, pendapatan daerah dari pajak dan retribusi akan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Karena hampir tidak ada tindakan pemerintah yang dapat dilaksanakan tanpa dukungan finansial, dana memainkan peran penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengurangan ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat dalam konteks pembentukan pemerintahan daerah dengan jumlah paling sedikit mungkin. Tujuannya adalah agar Pendapatan Asli Daerah secara bertahap menggantikan pendanaan transfer sebagai mekanisme utama untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah negara. Dalam melaksanakan inisiatif pemerintah di daerah, pertimbangan keuangan sangatlah penting. Oleh karena itu, ketersediaan dana merupakan salah satu indikator utama kemampuan daerah dalam menjalankan otonominya. Dalam konteks ini, kapasitas fiskal daerah adalah sejauh mana suatu daerah dapat memenuhi kewajiban keuangannya sendiri agar tidak selalu bergantung pada subsidi dan bantuan dana APBN. Suatu gagasan akan dijadikan variabel pada penelitian ini diambil dengan kerangka pemikiran tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan dari rumusan masalah maka penulis membuat hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
2. Diduga Dana Transfer berpengaruh positif terhadap rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.
3. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022
4. Diduga Pendapatan Asli Daerah Dana Transfer Dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Metode kuantitatif dan deskriptif digunakan penulis pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berdasarkan pada informasi yang diambil dari karya-karya yang diterbitkan sebelumnya oleh organisasi-organisasi seperti Kementerian Keuangan Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber data sekunder meliputi perpustakaan, arsip, dan makalah lain yang tersedia untuk umum. Penelitian ini menggunakan Rasio Kapasitas Fiskal yaitu variabel terikatnya dan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Jumlah Penduduk yaitu variabel bebasnya. Pada tahun 2017 hingga 2022, penelitian ini mengamati 2 kota dan 13 kabupaten di Provinsi Lampung. Data yang digunakan data panel, terdiri dari informasi *time series* dan *cross-sectional*. Data *cross-sectional* Provinsi Lampung berasal dari 13 kabupaten dan 2 kota, sedangkan data *time series* mencakup tahun 2017–2022.

Tabel 3.1 Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Satuan	Sumber Data
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Milyar Rupiah	Kemenkeu
Dana Transfer	DT	Milyar Rupiah	Kemenkeu
Jumlah Penduduk	JP	Juta Jiwa	BPS
Rasio Kapasitas Fiskal	RKFD	Rasio	Kemenkeu

B. Definisi Variabel

Untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini, dibawah ini merupakan penjelasan yang menjadi fokus untuk dianalisis :

1. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan asli daerah menjadi jenis penerimaan daerah yang bersumber dari perekonomian daerah dan potensi yang belum dimanfaatkan (Situngkir, 2009). PAD yang lebih besar menunjukkan bahwa suatu daerah tidak memerlukan dana pemerintah pusat untuk menutupi pengeluarannya. Data yang digunakan adalah data Perubahan Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan rumus $\Delta PAD = PAD_t - PAD_{t-1}$ pada realisasi anggaran pendapatan pada pos pendapatan asli daerah mulai periode 2017–2022. Data diperoleh dari Kementerian Keuangan.

2. Dana Transfer

Dana transfer yaitu Pendapatan APBN transfer kepada pemerintah regional sehingga daerah dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan berinvestasi dalam inisiatif desentralisasi. Data yang digunakan adalah data Perubahan Dana transfer yang dihitung dengan rumus $\Delta DT = DT_t - DT_{t-1}$ pada realisasi anggaran pendapatan mulai periode 2017–2022. Data diperoleh dari Kementerian Keuangan.

3. Jumlah Penduduk

Penduduk mencakup setiap individu yang tinggal di wilayah suatu negara selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang tinggal kurang dari enam bulan namun memiliki niat untuk menetap secara permanen. Data yang digunakan adalah data Perubahan Jumlah penduduk yang dihitung dengan rumus $\Delta JP = JP_t - JP_{t-1}$ mulai periode 2017–2022. Data diperoleh dari BPS.

4. Rasio Kapasitas Fiskal

Rasio Kapasitas Fiskal, pengelompokan daerah berdasarkan peta kapasitas fiskalnya, hal ini memberikan gambaran mengenai kapasitas keuangannya dan menjadi acuan dalam menilai kemampuan pengelolaan keuangan masing-masing daerah. Berikut merupakan rumus Rasio kapasitas fiskal:

$$RKFD_{kabupaten/kota} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{\text{Belanja pegawai}_{kab/kota}}$$

Data yang digunakan adalah data rasio kapasitas fiskal daerah, dimulai pada periode 2017-2022. Data diperoleh dari kementerian keuangan tentang peta kapasitas fiskal daerah.

C. Metode Analisis

Pendekatan regresi linear berganda digunakan untuk analisis dalam penelitian ini. Analisis regresi ini berupaya mencari rata-rata (populasi) dengan cara menguji hubungan suatu variabel terikat terhadap faktor lain atau variabel bebas (Gujarati, 2009).

Model persamaan regresi nya adalah sebagai berikut ini:

$$RKFD_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DT_{it} + \beta_3 JP_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

RKFD	:	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (rasio)
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah (milyar rupiah)
DT	:	Dana Transfer (milyar rupiah)
JP	:	Jumlah penduduk (Juta Jiwa)
β_0	:	Konstanta
$\beta_{1,2,3}$:	Koefisien Regresi
I	:	<i>cross section</i>
T	:	<i>time series</i>
μ_{it}	:	<i>Error term</i>

D. Prosedur Analisis Data

1. Analisis Statistic Deskriptif

Analisis statistic deskriptif kuantitatif digunakan agar dapat mengkarakterisasi semua variabel penelitian secara sistematis. Tabel statistik deskriptif yang menampilkan nilai tertinggi, rendah, dan nilai rata-rata pada variabel penelitian.

2. Metode Regresi

Untuk mendapatkan model yang tepat untuk regresi data panel dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*, dan *Common Effect Model*.

a. Metode *Common Effect Model* (CEM)

Menurut Widarjono (2018) *Common effect model* adalah pendekatan paling dasar untuk pengestimasi data panel karena pada metode ini hanyalah menggabungkan data deret waktu dan data lintas bagian tanpa mempertimbangkan perbedaan individual atau temporal. Gujarati (2009) menuliskan model persamaan *common effectmodel* dibawah ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

Y_{it}	:	Variabel terikat
X_{1it} dan X_{2it}	:	Variabel bebas
β_0	:	Constanta
β_1, β_2	:	coefisien regresi
μ_{it}	:	<i>Error term</i>

b. Metode *Fixed Effect Model* (FEM)

Menurut Widarjono (2018) ,motode *fixed effect model* menunjukkan variasi intersep penampang tetapi mempertahankan kemiringan yang konsisten (koefisien regresi) sepanjang waktu. Berikut persamaan fixed effect model

yang biasa disebut pendekatan Least Squares Dummy Variables (LSDV) (Gujarati, 2009).

$$Y_{it} = \beta_0i + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3D_{1it} + \beta_4D_{2it} + \beta_nD_{nit} + \mu_{it}$$

Keterangan :

Y_{it}	: Variabel terikat individu
X_{1it} dan X_{2it}	: Variabel bebas individu
β_0	: Konstanta
β_1, β_2, \dots	: Koefisien regresi
D_1, D_2, \dots, n	: 1 untuk lintas individu memiliki pengaruh dan 0 untuk lintas individu tidak memiliki pengaruh
μ_{it}	: <i>Error term</i>

c. Metode *Random Effect Model* (REM)

Menurut Widarjono (2018). Data panel dengan potensi korelasi yang bergantung pada waktu dan orang antara faktor-faktor gangguan dapat diperkirakan dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM). Gujarati (2009) menuliskan persamaan REM dibawa ini.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3X_{3it} + \epsilon_i + \mu_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3X_{3it} + w_{it}$$

Keterangan :

Y_{it}	: Variabel terikat individu
X_{1it} dan X_{2it}	: Variabel bebas individu
β_0	: Constanta
$B_{1,2,3}$: coefisien <i>slope</i>
μ_{it}	: <i>Error term</i> individu ke i dan waktu ke t
ϵ_i	: <i>Error term</i>
w_{it}	: $\epsilon_{it} + \mu_i$

3. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Dua model, *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*, dibandingkan menggunakan uji Chow. Berikut hipotesisnya.

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Untuk menolak H_0 dan menerima H_a maka F-hitung nilainya lebih besar dari pada nilai F-tabel. Dalam hal ini, *Fixed Effect Model* adalah yang paling sesuai. Sebaliknya, *Common Effect Model* ditetapkan layak diterapkan ketika nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel, sehingga menyebabkan diterimanya H_0 dan ditolaknyanya H_a . Sebagai alternatif juga dapat melihat nilai *P-value*. *Fixed Effect Model* sebaiknya digunakan bila *P-value* lebih rendah dari taraf sebenarnya (α), namun *Common Effect Model* sebaiknya digunakan bila *P-value* lebih besar dari taraf nyata (α).

b. Uji Hausman

Dua model yang dibandingkan adalah Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*) dan Model Efek Acak (*Random Effect Model*) menggunakan uji Hausman. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Untuk kriteria menolak H_0 dan menerima H_a jika nilai Chi-Square lebih besar (>) dari nilai Chi-Square tabel. Model *Fixed Effect* ditentukan menjadi model yang paling sesuai. Apabila nilai Chi-Square kurang dari nilai Chi-Square tabel, maka menerima hipotesis H_0 dan menolak hipotesis H_a . Maka *Common Effect Model* adalah yang paling sesuai. Selain itu, nilai *p-value* dapat dilakukan. Apabila *p-value* lebih dari (α) sebenarnya, *Random Effect Model*

menjadi pilihan yang tepat, sedangkan *Fixed Effect Model* menjadi pilihan yang tepat bila p-value nilainya kurang dari (α) sebenarnya.

c. Uji Lagrange Multiplier

Kedua model yaitu *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)* yang dapat dipilih terbaik menggunakan uji ini. Berikut hipotesis pengujian ini

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_a = \text{Random Effects Model}$

Ketika nilai P-value berada diatas taraf aktual (α), maka harus menolak hipotesis H_0 . Hasilnya melihatkan bahwa model *random effect* paling cocok digunakan. Sebaliknya, kita dapat menolak H_a bila nilai P kurang dari nilai sebenarnya ($\alpha=5\%$). Dapat menyimpulkan *Common Effect Model* adalah yang paling cocok untuk model regresi.

4. Pengujian Asumsi Klasik

Agar pngestimasi OLS yang ada menjadi pilihan yang terbaik, maka model regresi sebelumnya harus berdasarkan syarat pengujian asumsi klasik. Syarat yang harus terpenuhi adalah *Best Linear Unbiased Estimator*.

a. Uji Multikolinearitas

Menurut Widarjono (2018) Rahner Frish pertama kali menggunakan kata "multikolinearitas" dalam karyanya. Saling ketergantungan variabel independen regresi diperjelas dengan multikolinearitas. Dengan menggunakan korelasi parsial antara variabel independen, penelitian ini akan menemukan permasalahan multikolinearitas. Menurut Widarjono (2018), koefisien korelasi yang tinggi didefinisikan sebagai nilai di atas 0,85 menunjukkan adanya masalah multikolinearitas dalam model. Tidak menunjukkan terjadinya multikolinearitas ketika nilai koefisien korelasinya rendah.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan agar dapat melihat varian tidak konstan pada variabel gangguan. Melihat nilai probabilitas menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas bila nilai prob lebih besar dari taraf nyata (α) atau 0,05, dan terdeteksi masalah heteroskedastisitas ketika nilai prob kurang dari taraf nyata (α) atau 0,05. Metode tambahan untuk menguji heteroskedastisitas mencakup deteksi pola grafik residu. Tidak ada pola residu yang terlihat jika residunya homoskedastis, atau mempunyai varian yang sama. Akan tetapi, pola yang berbeda akan muncul jika residunya menunjukkan heteroskedastisitas.

5. Pengujian Hipotesis

Pada intinya, ekonometrika adalah tentang pengujian hipotesis. Tes ini tidak hanya berguna untuk menarik kesimpulan penelitian, tetapi juga digunakan untuk memeriksa keakuratan data penelitian.

a. Uji t

Menurut Gujarati (2009) Dengan pengasumsian seluruh variabel independen lain tetap bersifat konstan, uji t-stat digunakan agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini dilakukan uji t sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Rasio Kapasitas Fiskal

$H_0 : \beta_1 = 0$, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

$H_a : \beta_1 > 0$, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

2. Pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Rasio Kapasitas Fiskal

$H_0 : \beta_2 = 0$ Pendapatan Transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

$H_a : \beta_2 > 0$, Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

3. Pengaruh Jumlah penduduk terhadap Rasio Kapasitas Fiskal

$H_0 : \beta_2 = 0$ Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

$H_a : \beta_2 > 0$, Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022.

Derajat kebebasan (df) didefinisikan sebagai selisih antara jumlah observasi (n) dengan jumlah variabel (k), dengan tingkat signifikansi 0,05 dan k merupakan jumlah variabel yang digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian maka kriterianya adalah menolak hipotesis (H_0) apabila nilai t-hitung lebih tinggi(>) daripada nilai t-tabel; menerima hipotesis (H_0) apabila nilai t-hitung lebih kecil (α); dan terima H_0 jika nilai probability nya kurang dari 0,05.

b. Uji F

Agar dapat mengetahui hubungan variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen secara bersamaan digunakan uji F (Gujarati, 2009). Hipotesis berikut ini:

H_0 : variabel bebas secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

H_a : variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Adapun cara untuk menguji hipotesis yaitu dengan membandingkan nilai f yang dihitung dengan f-tabel; Hal ini akan mengungkap nilai probabilitas F-

statistik yang selanjutnya dapat digunakan untuk menolak ataupun menerima hipotesis.

6. Koefisien Determinasi (R Square)

Salah satu cara menilai efektivitas regresi data panel adalah dengan melihat koefisien determinasi (R^2). Metrik ini menunjukkan sejauh mana variabel independen menjelaskan fluktuasi yang diamati pada variabel dependen. Terdapat rentang nilai R^2 , dari nol hingga satu, dengan rentang pastinya adalah $0 < R^2 < 1$. Pengaruh yang lebih tinggi terhadap variabel terikat dan model yang lebih baik ditunjukkan dengan nilai R^2 yang mendekati 1 (satu). Namun ketika mendekati nol, proporsi variabel terikat yang berasal dari variabel bebas semakin berkurang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dicapai setelah menjelaskan dan menganalisis data.

1. Berdasarkan tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung terhadap rasio kapasitas fiskal pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Di Provinsi Lampung, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah dipengaruhi secara signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, sesuai dengan temuan penelitian. Dengan demikian, jelas terlihat adanya korelasi positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan rasio kapasitas fiskal daerah, yang merupakan ukuran kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya sendiri melalui PAD. Peningkatan PAD mungkin menandakan berkurangnya atau setidaknya berkurangnya jumlah uang transfer yang diterima oleh pemerintah pusat. Bila hal ini berhasil terlaksana, maka kita katakan daerah tersebut otonom. Kontribusi PAD untuk membiayai kebutuhan atau belanja daerah mencerminkan tingkat kemandirian.
2. Berdasarkan tujuan penelitian menganalisis Dana Transfer terhadap rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022, hasil perhitungan diperoleh Dana Transfer tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Lampung tahun 2017-2022. Hal ini berarti ketika Dana Transfer meningkat maka dapat menurunkan rasio kapasitas fiskal daerah. Dana Transfer dalam hal ini menunjukkan semakin sedikit dana transfer yang diberikan kepada daerah akan semakin sedikit ketergantungan daerah terhadap negara. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin sedikit juga Dana Transfer yang diterima oleh daerah. Sebaliknya,

semakin rendah tingkat kemajuan daerah maka semakin meningkat besaran dana transfer yang akan didapat oleh daerah, hal ini mampu membuat kinerja keuangan pemerintah semakin menurun.

3. Berdasarkan tujuan penelitian menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap rasio kapasitas fiskal di Provinsi Lampung tahun 2017-2022, hasil perhitungan diperoleh Jumlah Penduduk tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Lampung tahun 2017-2022. Ini berarti ketika Jumlah Penduduk meningkat maka dapat menurunkan rasio kapasitas fiskal daerah.
4. Tujuan penelitian telah tercapai, dan temuan menunjukkan bahwa Rasio Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Lampung secara bersama-sama dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Jumlah Penduduk.

B. Saran

Beberapa rekomendasi yang muncul dari kumpulan literatur yang ada yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintahan Provinsi Lampung hendaknya mengoptimalkan pendapatan dari potensi daerah yang ada agar lebih memaksimalkan hasil pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah. Untuk memperluas PAD, Pemerintah Daerah harus mengambil inisiatif yang efektif. Ketika suatu daerah memperoleh otonomi yang lebih besar, ketergantungannya pada pembayaran transfer pusat berkurang, yang pada akhirnya meningkatkan besaran PAD melalui pengumpulan besaran pajak dan retribusi daerah yang efisien.
2. Pengurangan ketergantungan keuangan daerah dan pembentukan daerah otonom merupakan harapan bahwa pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana transfer APBN secara efektif dan efisien. Karena itu, harapannya pemerintah dapat memanfaatkan potensi kabupaten dan kota untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan, termasuk PAD, dengan berinvestasi pada sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambya, A., & Putri, W. E. (2017). *Analisis Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Lampung Tengah (Studi pada Kabupaten Induk dan Daerah Otonomi Baru)*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(0), 127.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1), 177–191.
- Bird, Richard M. and Francois Vaillancourt. 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fanggidae, F. O. (2020). Perkembangan Kapasitas Fiskal dan Ruang Fiskal Kota Kupang, 2010-2019. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1), 35-39
- Gujarati, D. (2009). *Basic Econometrics* (Noelle Fox (ed.); 5th Editio). McGraw-Hill.
- Halim, Abdul. dan Damayanti, T. W. (2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Jogjakarta.
- Ibrahim, Muhammad. 2013. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Bumi Aksara
- Herdiyana, D. (2019). Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 22-22.
- Hendriwiyanto, G.(2014). Pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi.
- Istiningsih, W. D., & Bawono, A. D. B. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Pada Periode 2019-2020. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 349-355
- Khusaini, Mohammad .(2006). *Ekonomi Publik :Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPF E Unibraw, Malang.

- Kristop, F. (2019). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah Kota BATU. *Jurnal Agregat*, 4(2)
- Lisnawati, L. (2018). Pengaruh Potensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Kapasitas Fiskal Di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1249-1262.
- Mardiasmo. (2011) . Perpajakan. Yogyakarta: Andi,
- Muhammad Fachrozi,(2020). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, *Jurnal Kajian Ilmiah Akutansi*, Vol. 10, No. 3.
- Muta'ali, Lutfi. (2015). Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE).
- Nggilu, Fadly, Harijanto Sabijono, and Victorina Tirayoh. (2016) . Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4: 623–35.
- Nurafni Kustianingsih, Muslimin dan Abdul Kahar, 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Tesis, Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana*, Universitas Tadulako
- Olivia, D. (2020). Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dalam Kerangka Penyelenggaraan Desentralisasi. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 85-93.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
- Purnima, D., Saleh, C., & Noor, I. (2015). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Fiskal Dengan Desentralisasi Fiskal Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(6), 3.
- Elia Radianto, 1997. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II suatu Studi di Maluku, Prisma Vol.3.
- Setyawati, Anis.2007. analisis pengaru PAD,DAU,DAK, dan belanja pembangunan teradap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 4.no 2

- Siahaan, Marihot P.(2005). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*,
- Suandy, Erly. (2011)Perencanaan Pajak. Edisi Keli. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 93
- Suryana. (2000) Perekonomian Pembangunan Problematika dan Pendekatan, Jakarta : *Selemba Empat*.
- Sutedi, Adrian. , (2008) Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah. Bogor: *Ghalia Indonesia*.
- Taryoko. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Todaro P. Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I, Jakarta *Penerbit : Erlangga*
- Triastuti, Darwin M. dan Ratminto. 2005. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jogjakarta. *Jurnal Sosio Sains*, volume 18 No. 2, April 2005 : 293-310.
- Waluyo, (2012).Akuntansi Pajak, Salemba Empat.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertasi Panduan EViews (5th ed.)*. UPP STIM YKPN.
- Yuliana; Adi Wijaya; Mauliadi. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil pajak serta dana bagi hasil non pajak terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi kalimantan timur. *Ekonomi Bisnis*, 23(1), 351–357